

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara (UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional). Pelaksanaan pendidikan di Indonesia masih mengalami berbagai macam hambatan, bahkan sebagian besar terletak pada proses pembelajaran. Dalam suatu proses pendidikan, guru memegang peranan yang sangat penting, sebab keberhasilan pelaksanaan proses pendidikan sangat tergantung pada guru. Sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional No. 14 Tahun 2010 mengenai Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru, bahwa “Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah”. Dari pengertian tersebut terlihat bahwa guru merupakan fasilitator utama dalam suatu proses pendidikan, sehingga diperlukan guru yang berkualitas guna tercapainya suatu pendidikan yang juga berkualitas.

Fullan (2001) dalam Ahmad Rizali, Indra Djati, dan Satria Darma (2009 : 12) mengatakan bahwa kelas dan sekolah baru akan efektif apabila (1) kita merekrut orang-orang terbaik untuk menjadi guru dan (2) lingkungan kerja dibuat nyaman dan kondusif untuk bekerja dan mendorong guru berkarya agar guru tidak loncat mencari pekerjaan lain. Dari pendapat tersebut, guru merupakan kunci utama efektivitas di dalam kelas dan sekolah. Ini diperkuat dengan pendapat Muhibbuddin (2008) dalam artikel Ilham Alfian Noor “Kompetensi Guru dan Efektivitas Sumber Belajar”, yaitu sebagai berikut :

“Salah satu fungsi guru adalah sebagai pengelola kegiatan belajar mengajar. Sebagai pengelola pembelajaran (learning manager), guru berperan dalam menciptakan iklim belajar yang memungkinkan siswa dapat belajar secara nyaman. Melalui pengelolaan kelas yang baik guru dapat menjaga kelas agar tetap kondusif untuk terjadinya proses belajar seluruh siswa. Sehingga kemampuan pengelolaan kelas sangat penting untuk dikuasai oleh guru, apalagi untuk model pembelajaran di luar kelas.”

Peranan guru sangat menentukan dalam usaha peningkatan mutu pendidikan formal. Untuk itu guru sebagai agen pembelajaran dituntut untuk mampu menyelenggarakan proses pembelajaran dengan sebaik-baiknya, dalam kerangka pembangunan pendidikan. Guru mempunyai fungsi dan peran yang sangat strategis dalam pembangunan bidang pendidikan, dan oleh karena itu perlu dikembangkan sebagai profesi yang bermartabat. Undang-Undang No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Pasal 4 menegaskan bahwa guru sebagai agen pembelajaran berfungsi untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional. Untuk dapat melaksanakan fungsinya dengan baik, guru wajib untuk memiliki syarat tertentu, salah satu di antaranya adalah kompetensi.

Raden Roro Suci Nurdianti, 2013

Pengaruh Manajemen Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) Terhadap Kompetensi Profesional Dan Kompetensi Pedagogik Guru Serta Implikasinya Pada Kinerja Guru Mata Pelajaran Ekonomi Di SMA Negeri Se-Kota Bandung

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Menurut Mulyasa (2011 : 18), karakteristik guru yang dinilai kompeten secara profesional adalah mampu mengembangkan tanggung jawab dengan baik, melaksanakan peran dan fungsinya dengan tepat, mampu bekerja untuk mewujudkan tujuan pendidikan di sekolah dan mampu melaksanakan peran dan fungsinya dalam pembelajaran di kelas. Jadi, guru yang profesional adalah guru yang memiliki kompetensi atau standar mutu yang dipersyaratkan untuk melakukan tugas pendidikan dan pengajaran serta mengedepankan nasib peserta didiknya untuk bisa menggunakan potensi dan kecakapan yang dimilikinya.

Berbagai fakta menunjukkan bahwa kualitas pendidikan di Indonesia sangat memprihatinkan. Sebagaimana dikemukakan Hamzah B. Uno dan Nina Lamatenggo (2012 : 20) bahwa hal tersebut tercermin antara lain dari hasil studi kemampuan membaca untuk tingkat sekolah dasar (SD) yang dilaksanakan oleh organisasi *International Educational Achievement* (IEA) menunjukkan bahwa siswa SD di Indonesia berada pada urutan ke-38 dari 39 negara peserta studi. Sementara untuk tingkat sekolah lanjutan tingkat pertama (SLTP), studi untuk kemampuan matematika siswa SLTP di Indonesia berada pada urutan ke-39 dari 42 negara, dan untuk kemampuan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) hanya berada pada urutan ke-40 dari 42 negara peserta. Permasalahan-permasalahan ini menjadi salah satu ciri bahwa kinerja pendidikan Indonesia masih cukup rendah. Pemasalahan pendidikan yang terjadi di Indonesia tentunya tidak terlepas dari peranan berbagai Sumber Daya Manusia yang ada didalamnya, salah satunya yaitu guru.

Raden Roro Suci Nurdianti, 2013

Pengaruh Manajemen Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) Terhadap Kompetensi Profesional Dan Kompetensi Pedagogik Guru Serta Implikasinya Pada Kinerja Guru Mata Pelajaran Ekonomi Di SMA Negeri Se-Kota Bandung

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Pemerintah sempat menyelenggarakan Ujian Kompetensi Awal bagi guru-guru yang akan mengikuti sertifikasi. Ternyata hasil yang diberikan tidak maksimal. Hal ini terlihat dari nilai rata-rata sebesar 42,5 dengan rincian nilai yang dapat dilihat pada tabel 1.1.

Data hasil Uji Kompetensi Awal yang telah dilakukan di awal tahun 2012 tersebut menunjukkan bahwa sebagian guru-guru yang terdapat di Kota Besar di Indonesia kenyataannya masih memiliki wawasan yang sempit mengenai profesi yang dijalannya. Dengan rata-rata sebesar 42,5 dan nilai tertinggi 50,1 memperlihatkan bahwa sebagian besar guru di Indonesia belum memiliki kompetensi yang memadai. Untuk provinsi Jawa Barat sendiri, rata-rata nilai yang diperoleh dalam UKA adalah sebesar 44,0. Nilai tersebut cukup memprihatinkan. Peralnya, diantara provinsi lainnya di pulau jawa, Jawa Barat menduduki nilai yang terendah. Jawa Barat yang menyumbang hampir seperlima penduduk Indonesia, tentu memiliki pengaruh besar terhadap pencapaian pendidikan di Indonesia. Bagi Jawa Barat sendiri, kualitas SDM bisa dilihat dari capaian ini. (Rieke Diah Pitaloka & Teten Masduki, 2013, “Ada apa dengan pendidikan di Jawa Barat?”)

Tabel 1.1
Nilai Ujian Kompetensi Awal Terbesar Per-Provinsi di Indonesia

No.	Provinsi	Nilai
1.	Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)	50,1
2.	DKI Jakarta	49,2
3.	Bali	48,9
4.	Jawa Timur	47,1
5.	Jawa Tengah	45,2

Raden Roro Suci Nurdianti, 2013

Pengaruh Manajemen Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) Terhadap Kompetensi Profesional Dan Kompetensi Pedagogik Guru Serta Implikasinya Pada Kinerja Guru Mata Pelajaran Ekonomi Di SMA Negeri Se-Kota Bandung

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

6.	Jawa Barat	44,0
7.	Kepulauan Riau	43,8
8.	Sumatera Barat	42,7
9.	Papua	41,1
10.	Banten	41,1

Sumber : Jawa Pos Group Online 2012

Pada dasarnya terdapat empat kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru, diantaranya Kompetensi Pedagogik, Kompetensi Profesional, Kompetensi Sosial, dan Kompetensi Pribadi. Dari keempat kompetensi yang harus dimiliki guru, dua di antaranya dinilai masih menjadi problem serius dan krusial di kalangan guru, yakni kompetensi pedagogik dan kompetensi profesional. Dari aspek kompetensi pedagogik, misalnya, guru dinilai belum mampu mengelola pembelajaran secara maksimal, baik dalam hal pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, maupun pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Dari aspek kompetensi profesional, banyak guru yang dianggap masih “gagap” dalam menguasai materi ajar secara luas dan mendalam sehingga gagal menyajikan kegiatan pembelajaran yang bermakna dan bermanfaat bagi siswa. (Sawali Tuhusetya : 2008, *Mampukah Pemberdayaan MGMP Menjadi “Therapi Kejut” bagi Guru?*)

Kompetensi guru juga menentukan kinerja guru. Apabila kompetensi guru masih cukup rendah, tentunya kinerja guru yang bersangkutan pun belum optimal. Walaupun terdapat berbagai program pemerintah guna mengevaluasi kinerja guru, nyatanya hasil yang diberikan tidak sesuai dengan kenyataan yang terjadi di

Raden Roro Suci Nurdianti, 2013

Pengaruh Manajemen Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) Terhadap Kompetensi Profesional Dan Kompetensi Pedagogik Guru Serta Implikasinya Pada Kinerja Guru Mata Pelajaran Ekonomi Di SMA Negeri Se-Kota Bandung

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

lapangan. Fenomena yang terjadi adalah kinerja guru yang sudah lolos sertifikasi masih belum memuaskan. Motivasi kerja yang tinggi justru ditunjukkan oleh guru-guru di berbagai jenjang pendidikan yang belum lolos sertifikasi, dengan harapan segera mendapat sertifikasi berikut uang tunjangan profesi. Hasil survei yang dilakukan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) mengenai dampak sertifikasi profesi guru terhadap kinerja guru menunjukkan bahwa 16 dari 28 provinsi yang diteliti memberikan hasil kurang memuaskan. Padahal, diharapkan sertifikasi bisa meningkatkan kinerja dan profesionalisme guru. (Unifah Rosyidi dalam Kompas 2009)

Dari fenomena tersebut terlihat bahwa kinerja guru di Indonesia masih jauh dari kualitas yang baik. Bahkan peningkatan kinerja yang diharapkan dari guru yang sudah bersertifikasi, seperti perubahan pola kerja, motivasi kerja, pembelajaran, atau peningkatan diri, dinilai masih tetap sama. Guru-guru yang sudah lolos sertifikasi sudah mulai enggan mengikuti seminar atau pelatihan untuk peningkatan kualitas diri. Untuk menjaga mutu guru yang sudah lolos sertifikasi, diperlukan pola pembinaan yang terpadu dan berkelanjutan bagi para guru.

Salah satu teori yang mendasari kajian kinerja guru adalah teori dari Sutermeister. Teori ini mengemukakan bahwa "*performance = f (ability x motivation)*". Menurut teori ini kinerja seseorang merupakan fungsi perkalian antara kemampuan dan motivasi. Faktor kemampuan didalamnya mencakup pengetahuan dan keterampilan, dimana indikator dari pengetahuan adalah

Raden Roro Suci Nurdianti, 2013

Pengaruh Manajemen Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) Terhadap Kompetensi Profesional Dan Kompetensi Pedagogik Guru Serta Implikasinya Pada Kinerja Guru Mata Pelajaran Ekonomi Di SMA Negeri Se-Kota Bandung

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

pendidikan dan pengalaman kerja, sedangkan untuk indikator keterampilan diantaranya adalah pelatihan, sikap, dan kepribadian. (Sutermeister, 1963: 11)

Berbagai cara dapat dilakukan guna meningkatkan profesionalisme dan kualitas guru di Indonesia. Salah satu upaya riil yang telah dilakukan yakni melalui pembentukan MGMP (Musyawarah Guru Mata pelajaran). Berikut definisi MGMP yang tertera dalam Pedoman Penyelenggaraan MGMP (Depdiknas, 1995) :

“MGMP adalah forum/wadah kegiatan professional guru mata pelajaran sejenis di sanggar yang terdiri dari dua unsur yaitu Musyawarah dan Guru Mata Pelajaran. Musyawarah mencerminkan kegiatan dari, oleh, dan untuk guru, sedangkan guru mata Pelajaran adalah guru SMP dan SMA negeri atau swasta yang mengasuh dan bertanggung jawab mengelola mata pelajaran yang ditetapkan di dalam kurikulum”

MGMP (Musyawarah Guru Mata Pelajaran) adalah wadah untuk pertemuan para guru mata pelajaran sekolah. Lembaga ini dibentuk tidak hanya sebagai forum silaturahmi, tetapi juga sebagai forum untuk menampung berbagai permasalahan yang dihadapi guru di sekolah masing-masing sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diembannya (Rahima, dalam artikel *MGMP Wadah untuk Pemberdayaan Guru*, 2008). Ini membuktikan bahwa pembentukan MGMP cukup berperan dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh guru, sesuai dengan bidang studinya masing-masing.

Melalui MGMP diharapkan guru dapat mempertahankan kualitas profesionalismenya sesuai tuntutan jaman dan kebutuhan sekolah. Selain itu,

MGMP juga dituntut untuk berperan sebagai (1) *reformer*, dalam *classroom*

Raden Roro Suci Nurdianti, 2013

Pengaruh Manajemen Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) Terhadap Kompetensi Profesional Dan Kompetensi Pedagogik Guru Serta Implikasinya Pada Kinerja Guru Mata Pelajaran Ekonomi Di SMA Negeri Se-Kota Bandung

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

reform, terutama dalam reorientasi pembelajaran efektif, (2) *mediator* dalam pengembangan dan peningkatan system pengujian, (3) *supporting agency*, dalam inovasi manajemen kelas dan manajemen sekolah, (4) *collaborator*, terhadap unit terkait dan organisasi profesi yang relevan, (5) evaluator dan *developer school reform* dalam konteks MPMBS dan (6) *clinical dan academic supervisor*, dengan pendekatan penilaian appraisal (Hunaenah dalam Duwi Tri Lestari, 2012 : 11).

Sebagaimana dikemukakan dalam *workshop 'Better Teaching and Learning'* (BTL) yang diselenggarakan oleh USAID dan DBE3 (2009) bahwa :

“Peningkatan profesionalisme guru dapat dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya adalah melalui wadah Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP). Namun demikian, hasil studi DBE3 menunjukkan bahwa MGMP belum mencapai kinerja yang optimal. Beberapa faktor yang mempengaruhi antara lain ukuran organisasi yang masih terlalu besar, manajemen yang belum mapan, ketersediaan anggaran yang belum mencukupi, serta dukungan para stakeholder yang masih kurang. Di samping itu, pembentukan MGMP dan pelaksanaan kegiatannya masih diatur dari atas, bukan merupakan organisasi dan kegiatan yang benar-benar dibutuhkan oleh guru sendiri.”

Penjelasan tersebut memperlihatkan bahwa penyelenggaraan MGMP memiliki peranan penting dalam peningkatan profesionalisme guru, namun memang dalam penyelenggaraan kegiatan MGMP pun guru masih dihadapkan dengan berbagai persoalan yang menyebabkan penyelenggaraan kegiatan tersebut belum optimal. Peningkatan profesionalisme melalui kegiatan MGMP, dapat mengasah kompetensi yang dimiliki oleh guru, yang nantinya juga akan menentukan kinerja masing-masing guru yang bersangkutan.

Raden Roro Suci Nurdianti, 2013

Pengaruh Manajemen Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) Terhadap Kompetensi Profesional Dan Kompetensi Pedagogik Guru Serta Implikasinya Pada Kinerja Guru Mata Pelajaran Ekonomi Di SMA Negeri Se-Kota Bandung

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Mengingat bahwa mata pelajaran Ekonomi juga merupakan salah satu pelajaran yang diberikan dalam Ujian Nasional di tingkat SMA, maka penelitian ini penting untuk dilaksanakan guna peningkatan kompetensi dan kinerja guru Ekonomi yang tentunya memiliki tanggung jawab dalam mempersiapkan peserta didik mencapai hasil belajar yang memuaskan. Oleh karena itu penulis akan melakukan penelitian yang berjudul :

“Pengaruh Manajemen Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) terhadap Kompetensi Profesional dan Kompetensi Pedagogik Guru serta Implikasinya pada Kinerja Guru Mata Pelajaran Ekonomi di SMA Negeri se-Kota Bandung“.

1.2 Identifikasi dan Perumusan Masalah

Kajian dalam penelitian ini yaitu kinerja guru. Terdapat banyak faktor yang mempengaruhi kinerja guru, salah satunya yakni kompetensi guru. Kompetensi yang dipaparkan dalam penelitian ini yaitu kompetensi profesional dan kompetensi pedagogik guru. Di sisi lain, kompetensi guru juga turut dipengaruhi oleh pelatihan yang salah satunya berbentuk penyelenggaraan kegiatan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP). Adapun kegiatan MGMP sebagai suatu manajemen, indikator keberhasilannya dilihat dari ukuran efektivitas. Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini diantaranya :

Raden Roro Suci Nurdianti, 2013

Pengaruh Manajemen Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) Terhadap Kompetensi Profesional Dan Kompetensi Pedagogik Guru Serta Implikasinya Pada Kinerja Guru Mata Pelajaran Ekonomi Di SMA Negeri Se-Kota Bandung

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

1. Bagaimana gambaran efektivitas manajemen MGMP, tingkat kompetensi professional guru, tingkat kompetensi pedagogik, dan tingkat kinerja guru Ekonomi SMA Negeri di Kota Bandung?
2. Bagaimana pengaruh efektivitas MGMP terhadap kompetensi profesional guru ekonomi SMA Negeri di Kota Bandung?
3. Bagaimana pengaruh efektivitas MGMP terhadap kompetensi pedagogik guru ekonomi SMA Negeri di Kota Bandung?
4. Bagaimana pengaruh kompetensi profesional terhadap kinerja guru ekonomi SMA Negeri di Kota Bandung?
5. Bagaimana pengaruh kompetensi pedagogik terhadap kinerja guru ekonomi SMA Negeri di Kota Bandung?
6. Bagaimana pengaruh efektivitas MGMP terhadap kinerja guru ekonomi SMA Negeri di Kota Bandung?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini yakni untuk mengetahui pengaruh efektivitas manajemen MGMP ekonomi di Kota Bandung terhadap kompetensi professional dan kompetensi pedagogik serta implikasinya terhadap kinerja guru. Lebih spesifik lagi, penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan gambaran efektivitas manajemen MGMP, tingkat kompetensi professional guru, tingkat kompetensi pedagogik, dan tingkat

Raden Roro Suci Nurdianti, 2013

Pengaruh Manajemen Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) Terhadap Kompetensi Profesional Dan Kompetensi Pedagogik Guru Serta Implikasinya Pada Kinerja Guru Mata Pelajaran Ekonomi Di SMA Negeri Se-Kota Bandung

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

kinerja guru Ekonomi SMA Negeri di Kota Bandung Untuk mendeskripsikan tingkat kompetensi profesional guru Ekonomi SMA Negeri di Kota Bandung.

2. Untuk mengetahui pengaruh efektivitas MGMP terhadap kompetensi profesional guru ekonomi SMA Negeri di Kota Bandung.
3. Untuk mengetahui pengaruh efektivitas MGMP terhadap kompetensi pedagogik guru ekonomi SMA Negeri di Kota Bandung.
4. Untuk mengetahui pengaruh kompetensi profesional terhadap kinerja guru ekonomi SMA Negeri di Kota Bandung.
5. Untuk mengetahui pengaruh kompetensi pedagogik terhadap kinerja guru ekonomi SMA Negeri di Kota Bandung.
6. Untuk mengetahui pengaruh efektivitas MGMP terhadap kinerja guru ekonomi SMA Negeri di Kota Bandung.

1.3.2. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasanah ilmu pendidikan, khususnya mengenai pengembangan Kompetensi dan Kinerja Guru melalui penyelenggaraan Kegiatan MGMP di berbagai bidang studi dan jenjang pendidikan.

2. Secara Praktis

Raden Roro Suci Nurdianti, 2013

Pengaruh Manajemen Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) Terhadap Kompetensi Profesional Dan Kompetensi Pedagogik Guru Serta Implikasinya Pada Kinerja Guru Mata Pelajaran Ekonomi Di SMA Negeri Se-Kota Bandung

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

- a. Untuk memberikan informasi mengenai pengaruh efektivitas MGMP terhadap kompetensi profesional dan kompetensi pedagogik guru serta implikasinya pada kinerja guru mata pelajaran ekonomi.
- b. Sebagai pertimbangan bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam pengembangan profesi keguruan serta peningkatan kualitas pendidikan khususnya di Indonesia.



Raden Roro Suci Nurdianti, 2013

Pengaruh Manajemen Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) Terhadap Kompetensi Profesional Dan Kompetensi Pedagogik Guru Serta Implikasinya Pada Kinerja Guru Mata Pelajaran Ekonomi Di SMA Negeri Se-Kota Bandung

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu